

## Peran Lingkungan dan Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan Islam

Evi Maelani<sup>1\*</sup>, Suklani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia

<sup>2</sup>Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia

\* [maelanievi93@gmail.com](mailto:maelanievi93@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengangkat tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan. Untuk mengetahui manajemen lembaga pendidikan mengelola potensi masyarakat sekitar dalam pengelolaan lembaga pendidikan, serta untuk mengeksplorasi unsur pendukung dan unsur yang menghambat proses partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Pola penelitian yang di pakai disini ialah studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah, bahwa cara yang dapat di pakai dalam pola manajemen partisipasi mencakup, 1) Mengembangkan komunikasi orang tua-anak dan masyarakat yang kuat. 2) Melibatkan Orang Tua dan Masyarakat dalam Program Sekolah dan 3) pemberian undangan kepada lingkungan sekitar ke pertemuan tahunan sekolah komunitas.

**Kata kunci** : manajemen; partisipasi; Pendidikan Islam.

### Abstract

*This research aims to determine community participation in the sustainability of educational institutions. To find out how the management of educational institutions manages the potential of the surrounding community in managing educational institutions, as well as to explore supporting elements and elements that hinder the process of community participation in educational institutions. The research pattern used here is literature review. The results obtained from this research are that methods that can be used in participation management patterns include, 1) Developing strong parent-child and community communication. 2) Involving Parents and the Community in School Programs and 3) providing invitations to the surrounding environment to the annual community school meeting.*

**Keywords:** Management; Participation; Islamic education.

## **I. PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar 1945 memberikan sebuah hal yang diemban yang mengatakan bahwasannya pemerintah RI itu terbentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (UUD, 2021). Secara tersirat bahwa salah satu tujuan adanya pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tujuan tersebut memiliki makna yang dalam dan tak terbatas yang jika diimplementasikan berupa kegiatan Pendidikan dengan segala perangkat penunjangnya. Maka dari itu sebuah kegiatan pendidikan sebagai usaha pemerintah dalam memberikan kecerdasan bagi seluruh bangsa Indonesia menjadi prioritas utama dalam pembangunan demi regenerasi dan keberlangsungan negara (Cahyaningrum & Diana, 2023). Tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut sangat berat dan tentunya tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal dan berhasil tanpa keterlibatan seluruh komponen bangsa. Hal ini dikarenakan kemampuan pemerintah yang terbatas dalam mengelola pendidikan baik anggaran maupun sumberdaya manusia.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Pepres, 2021), bahwa setiap lembaga pendidikan harus mampu mencapai standar minimal sebanyak 8 komponen standar nasional pendidikan. Delapan standar tersebut adalah Isi, kompetensi Lulusan, Proses, manajemen, finansial, Penilaian, Sarana Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan. Idealnya jika seluruh standar tersebut telah terpenuhi dan bahkan mampu melampaui kriteria minimal maka lembaga pendidikan tersebut akan mampu eksis di tengah masyarakat.

Bertolak belakang dengan hal tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai barometer kualitas lembaga mengalami hambatan yang terkadang sangat serius. Tidak sedikit lembaga pendidikan tidak mampu memenuhi tuntutan lingkungan terutama tuntutan siswa dan orang tua siswa dalam persaingan yang sangat ketat diantara lembaga pendidikan saat ini (Priyatna, 2021). Oleh karena itu, analisis mengenai kecenderungan animo masyarakat untuk mensekolahkan putra putrinya di suatu lembaga pendidikan merupakan hal yang menarik. Hal ini dikarenakan, bukan sekedar terpenuhinya seluruh Standar Nasional Pendidikan yang menjadi pemicu tingginya animo masyarakat akan tetapi juga terdapat faktor historis, kultur dan banyak komponen lainnya yang turut memberikan pengaruh (Dirjen Dikti Kemendikbud, 2020). Disinilah diperlukan kemampuan manajemen potensi yang ada dan tumbuh di masyarakat sehingga menjadi modal dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

*Maelani, Suklani*

Hal ini juga diungkap oleh Khaliq (2017), dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada Mts Muhammadiyah 3 Al-Furqon Banjarmasin. Melalui penelitian tersebut, di dapatkan sebuah informasi bahwa partisipasi yang dilakukan lingkungan sosial kepada proses pendidikan di MTs Muhammadiyah 3 Al Furqon Banjarmasin mencakup beberapa ragam, diantaranya 1) anggota komite madrasah, 2) melalui kegiatan di madrasah, dan 3) penjagaan madrasah. Di sisi lain, upaya yang tercapai melalui perumusan strategi dan pendekatan yang diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan dan perkembangan ikut berkecimpungnya masyarakat dalam proses pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al Furqon Banjarmasin menjangkau beberapa ranah yakni: 1) pengidentifikasian Masalah; 2) sikap dan hubungan sosial; dan 3) pengarahan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Rahayu (2021) pada penelitiannya dengan tema Manajemen Partisipasi Masyarakat Di Smp Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep mengungkap bahwa penelitian ini mengambil sebuah tujuan yakni untuk mengeksplor penerapan manajemen partisipasi masyarakat di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep yang terdiri atas proses *planning*, *implementing* dan *evaluating*. Selanjutnya, hasil yang diterima peneliti ialah bahwa terjalin dengan baiknya partisipasi masyarakat diwakilkan kepada komite sekolah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan ialah mencakup keunangan, decision making, usaha maupun ide/pemikiran. Adapun unsur pendukung mencakup proses akuntabilitas dan keterbukan dari pihak sekolah, dan program yang inovatif. Sedangkan unsur yang menghalanginya lebih mengarah pada limit waktu yang masyarakat miliki.

Menanggapi kedua penelitian di atas, dapat dilihat sejauhmana peran masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan bagaimana manajemen lembaga pendidikan dalam memaksimalkan potensi sumberdaya di masyarakat dalam meningkatkan eksistensi lembaga yang berimbas kepada animo masyarakat sekitar terhadap lembaga pendidikan, merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dianalisis dan diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menjadikan tujuan penelitian ini ialah untuk Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan. Untuk mengetahui manajemen lembaga pendidikan mengelola potensi masyarakat sekitar dalam pengelolaan lembaga pendidikan, serta untuk mengeksplorasi unsur pendukung dan unsur yang menghambat proses partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengaplikasikan studi pustaka atau literasi. Pengaplikasian pola ini merupakan rangkaian aktivitas di dalam penelitian yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan, memahami dan membuat catatan, serta mengatur hasil dari penelitian (Tracy, 2022). Studi kepustakaan menjadi bagian dari aktivitas

penelitian yang berfokus kepada pola teoritis yang dipakai dalam suatu peristiwa atau fenomena yang ada, sehingga dapat menjadi upaya pengembangan terhadap aspek-aspek yang memiliki manfaat secara teoritis dan praktis (Yin, 2016). Aktivitas penelitian ini di aplikasikan oleh penulis demi mencapai tujuan yang dirumuskan untuk memperoleh dasar dan demi memperoleh dan mengokohkan dasar teori, kerangka berpikir, menentukan pendapat awal, atau disebut juga hipotesis penelitian. Sehingga memungkinkan peneliti mengelompokkan, menyusun, mengatur dan menggunakan ragam sumber bacaan di bidangnya (Shaliha & Fakhzikril, 2022). Melalui kegiatan peninjauan pustaka, peneliti akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih besar dan juga terkoordinasi dengan baik tentang masalah yang diteliti. Penelusuran kepustakaan dilakukan setelah ditentukannya topik penelitian dan merumuskan masalah sebelum dimulainya proses pengumpulan data yang akan dijadikan sumber informasi dilakukan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Lembaga Pendidikan**

Pendidikan merupakan sebuah upaya yang mendasar dan terancang dengan baik demi menciptakan kondisi proses pembelajaran dan aktivitas belajar yang mengarahkan peserta didik lebih aktif dalam menumbuhkembangkan potensi dirinya agar meraih sebuah kemampuan spiritual kegamaan, kontrol diri, kualitas pribadi, kecerdasan, sikap, ilmu kehidupan, pengetahuan dasar dan skil yang mumpuni untuk bekerja sama di dalam masyarakat dengan di dasari aturan perundang-undangan yang berlaku (Nasution et al., 2022). Proses pendidikan berlangsung dalam sebuah lembaga pendidikan. sebagaimana yang saat ini ada di tengah masyarakat lembaga pendidikan terbagi menjadi 3 jenis yakni (Zenny Oktamia Rachman, Sonny Subroto Maheri, & Beny Mahyudi Saputra, 2022) :

1. Lembaga Pendidikan Informal merupakan organisasi pendidikan yang diterapkan dan di implementasikan pada lingkup keluarga.
2. Lembaga Pendidikan Formal dikatakan sebagai salah satu organisasi yang didalamnya terdapat hukum dasar yang sistematis dan terukur serta terdiri atas tingkat jenjang pendidikan yang dimulai dari level akademik dasar sampai kampus.
3. Lembaga akademik Non Formal dikenal sebagai sebuah organisasi pendidikan yang berada dalam lingkungan masyarakat, diciptakan oleh masyarakat dan menjadi sebuah organisasi yang melatih masyarakat mempelajari sebuah skill tertentu.

Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 (2021) menyoroti mengenai sistem pendidikan nasional yang di dalamnya mengatur cara pemerintah, pemerintah daerah, atau kota menyelenggarakan satuan pendidikan formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Dalam kerangka sistem pendidikan negara, madrasah merupakan lingkungan pembelajaran resmi untuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang diawasi dan didukung oleh Kementerian Agama. (Lely, 2017).

*Maelani, Suklani*

Struktur organisasi madrasah dibagi menjadi dua kategori berdasarkan lembaga penyelenggaranya: satuan pendidikan madrasah yang dijalankan oleh pemerintah (kadang-kadang disebut “madrasah negeri”) dan satuan pendidikan madrasah yang dijalankan oleh masyarakat (sering disebut “madrasah swasta”)(Al-Faruqy, 2021). Sedangkan berdasarkan informasi statistik yang didapatkan bahwa jumlah madrasah di Indonesia yang tidak mencapai 5% jumlahnya ditempatkan di madrasah negeri, menurut informasi yang diberikan oleh Kementerian Agama pada tahun 2018.

## **B. Partisipasi Masyarakat**

Keseluruhan proses tindakan yang dipikirkan dan dilaksanakan secara hati-hati, serta arahan berkelanjutan untuk memenangkan hati masyarakat luas, merupakan keterlibatan masyarakat dalam lembaga pendidikan. Suatu kelompok atau masyarakat harus terbentuk terlebih dahulu sebelum pendidikan dapat mengakar. Salah satu faktor yang mempengaruhi masa depan pendidikan setidaknya adalah masyarakat (Al-Faruqy, 2021). Faktor keberhasilan utama dalam pendidikan tinggi hampir pasti adalah tingkat keterlibatan dan partisipasi sosial yang tertinggi. (Hardiyati & Baroroh, 2019). salah satu kunci keberhasilan lembaga pendidikan adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan seluruh fokusnya kepada masyarakat sebagai komponen strategis. Pandangan ini didasari oleh adanya peran ganda masyarakat sebagai subjek dan objek, yang keduanya mempunyai implikasi praktis terhadap penyelenggaraan lembaga pendidikan.

Berkaitan dengan hal itu, seyogyanya masyarakat harus menjadi komponen penting ketika lembaga pendidikan mendorong penerimaan calon siswa baru. (Dudung, 2018). Sebab pendidikan pada lembaga tersebut bisa maju melalui masyarakat dan sebaliknya. Namun, reaksi masyarakat terhadap pemberian informasi tersebut memberikan tempat bagi mereka dalam berperan sebagai subyek yang mempunyai kekuasaan penuh untuk menyetujui atau menolaknya. Status masyarakat sebagai subjek semakin kokoh ketika anggota masyarakat memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai lulusannya. Maka dari itu, kolaborasi dan koordinasi positif dengan lingkungan sosial di sekitar lembaga mesti di-*manage* dengan baik (Arifin, Djatmiko, & Fuady, 2019). Kontribusi sosial secara akademik bisa di implementasikan melalui beberapa hal di bawah ini:

1. Kontribusi secara finansial, hal ini diwujudkan melalui pemberian sumbangan atau dana sesuai kemampuan masyarakat setempat
2. Kontribusi dalam ranah akademik, perwujudan dari kontribusi ini ialah rasa empati masyarakat dalam ranah penyelenggaraan aktivitas akademik yang lebih baik dan berkualitas.
3. Kontribusi dalam hal kebudayaan, hal ini di implementasikan ke dalam sebuah rasa peduli masyarakat kepada dan rasa memiliki terhadap nilai-nilai kebudayaan dan moralitas yang tercipta di lingkungan eksternal sekolah yang mengakibatkan

*Peran Lingkungan dan Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan Islam*

lembaga akademik mampu untuk beradaptasi dan berkonsolidasi dengan budaya eksternal yang ada.

### **C. Manajemen Partisipasi Masyarakat**

Tindakan pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan kerja individu dalam suatu organisasi dan pemanfaatan sumber daya pendukung suatu lembaga dalam upaya pencapaian objektivitas suatu organisasi atau lembaga akademik adalah definisi manajemen seperti yang diberikan oleh James A.F. Stoner (Hasanah, 2022) dalam bukunya *Management*. Manajemen Hubungan Masyarakat dan Sekolah/Madrasah Secara etimologis, “public school Relations” berasal dari kata bahasa Inggris “school/madrasah and community” yang berarti adanya ekosistem yang terancang antara lembaga (sekolah/madrasah) dengan masyarakat/lingkungan sekitar (Yuniarti, 2022). Maka dari itu pengelolaan dan pengaturan partisipasi dari masyarakat sekitar yang diimplikasikan dalam pendidikan menjadikannya suatu kebutuhan yang dibutuhkan dalam pengkondisian pola pendidikan yang digunakan di sekolah tersebut.

Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan penilaian merupakan langkah awal dalam mengelola keterlibatan masyarakat. Rencana kemudian dihasilkan berdasarkan hal apa saja yang menjadi perhatian utama dalam upaya memastikan keunggulan yang terintegrasi untuk menghasilkan aktivitas cadangan dalam proses akademik (Fatmawati, 2017). Langkah perencanaan berlangsung berdasarkan kebutuhan lembaga pendidikan dan juga masyarakat. Selanjutnya, selama fase implementasi, semua pihak manajemen merancang teknik dan saran yang dijalankan dengan akurat, pemikiran ke depan, dan keseriusan. Kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, dewan dan komite madrasah, serta masyarakat umum merupakan salah satu cara penerapan keterlibatan masyarakat (Winarsih, 2022). Masyarakat mendukung inisiatif pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru, staf, dan pemangku kepentingan lainnya (Al-Faruqy, 2021). Sebagai mitra kolaboratif, dewan sekolah mengambil bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, mengumpulkan sumber daya dan uang, serta memelihara hubungan kerja yang baik dengan masyarakat, organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan lembaga akademik.

Kemudian, selain fase perencanaan dan aplikasi yang semestinya diaplikasikan dengan baik, ada tahapan yang disebut sebagai tahap evaluasi dan kontroling. Kedua tahap itu, Sebelum, selama, dan setelah kegiatan, evaluasi dan pemantauan dilakukan untuk melacak pencapaian program dan memberikan masukan kepada pelaksana kegiatan (Magareta, 2021). Sekolah dan institusi pendidikan lainnya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat di kelas melalui beberapa strategi (Munandar, 2020), antara lain:

1. Mengembangkan komunikasi orangtua-anak dan masyarakat yang kuat.
2. Memberikan kesempatan bagi orang tua agar berpartisipasi dalam kegiatan sekolah

3. Undanglah lingkungan sekitar ke pertemuan tahunan sekolah komunitas.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat dalam ranag pendidikan. Hal itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Bab III pasal 4 peran serta/partisipasi masyarakat (Adib & Santoso, 2016) dapat berbentuk:

1. Penciptaan dan penyelenggaraan satuan pengajaran pada semua jenjang pendidikan pada jalur pendidikan sekolah, pada semua bentuk pendidikan selain pendidikan formal, dan jalur pendidikan luar sekolah
2. mengadakan dan mendukung tenaga kependidikan untuk melakukan pengajaran, bimbingan, dan/atau pengembangan peserta didik;
3. memperoleh dan menawarkan bantuan profesional untuk membantu penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan upaya pendidikan;
4. Mengadakan dan/atau melaksanakan inisiatif pendidikan yang tidak didirikan, diorganisir, atau didukung oleh pemerintah;
5. Memperoleh uang tunai dan memberikan bantuan melalui wakaf, hibah, kontribusi, pinjaman, beasiswa, dan cara lain yang sejenis;
6. Perolehan dan penyediaan ruang, bangunan, dan tanah untuk melaksanakan Perolehan dan penyediaan buku-buku pelajaran dan bahan-bahan pendidikan untuk melaksanakan Kegiatan pendidikan;
7. Memberikan kesempatan magang dan/atau pelatihan kerja;
7. Memberikan dukungan manajerial terhadap terciptanya pendidikan nasional dan terselenggaranya satuan pendidikan;
8. Memberikan gagasan dan pendapat mengenai bagaimana kebijakan harus diambil dan/atau bagaimana pertumbuhan pendidikan harus dipraktikkan

**D. Faktor Penghambat dan pendukung Manajemen Partisipasi Masyarakat**

Kontribusi dan partisipasi masyarakat pada aktivitas akademisi yang diaplikasikan dilembaga akademik merupakan komponen yang penting bagi kondisi lembaga akademik tersebut. maka dari itu, kontribusi masyarakat tak hanya pada caranya menyelesaikan permasalahan sekolah dalam ranah finansial, namun juga mendukungnya dengan mendorong, berpendapat dan menyajikan saran dalam pengembangan mutu sekolah (Rusmawati, 2020). Hanya saja, pada prakteknya, koordinasi dan kolaborasi yang diciptakan masyarakat dan komite sering di desentralisasikan kepada sekolah, lembaga pendidikan diberi kebebasan dalam urusan pengelolaan dan perencanaan program serta pengaplikasiannya dalam upaya pengembangan mutu pendidikan (Rifai, 2023). Di satu sisi, masyarakat pada umumnya berpartisipasi dalam pertumbuhan pendidikan; namun, mengundang orang untuk bergabung mungkin merupakan suatu tantangan (Islamia, 2020). Karena adanya hambatan sosial, kenyataan ini cukup

mendukung anggapan bahwa partisipasi sulit dicapai. Beberapa kendala seperti berikut ini menghambat warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan::

1. Pola pikir paternalistik yang telah merasuki masyarakat menjadikan sulitnya melakukan percakapan yang jujur.
2. Akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah selama ini.
3. Ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.
4. Hambatan budaya: Beberapa orang masih menganggap pendidikan formal bertentangan dengan adat istiadat mereka.
5. Kendala geografis, seperti jarak sekolah dengan lokasinya serta kurangnya akses jalan dan pilihan transportasi untuk membantu menuju ke sana.
6. Mahalnya biaya pendidikan, khususnya di sekolah menengah atas dan sekolah elit.

Di lain konsep, unsur pendukung yang menyebabkan masyarakat lebih aktif dan atraktif dalam memberikan kontribusinya dapat dirumuskan menjadi beberapa poin di bawah ini, diantaranya :

1. Cara pandang masyarakat yang semakin canggih yang sangat menghargai pendidikan dan memandangnya sebagai sarana untuk mempermudah pencarian kerja.
2. Adanya stratifikasi sosial yang memandang suatu derajat prestasi pendidikan tertentu sebagai suatu kebanggaan dan salah satu faktor penentu kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat.
3. Keyakinan umum bahwa pengetahuan dapat meningkatkan nasib seseorang dalam kehidupan.
4. Prasarana dan ketersediaan ruang belajar yang memadai
5. Sosialisasi secara terus-menerus mengenai nilai pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
6. Pemerintah menawarkan program wajib sekolah sembilan tahun.
7. Siswa mempunyai pilihan untuk melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi atau mengikuti lembaga kejuruan, yang mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja setelah lulus.
8. Salah satu program yang menekan biaya pendidikan di tingkat sekolah adalah Program Harga Operasional Sekolah (BOS).
9. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kolaborasi dan koordinasi yang dibangun antara sekolah dan lingkungan masyarakatnya merupakan objek utama yang dibahas melalui manajemen partisipasi

*Maelani, Suklani*

masyarakat dan sekolah. Biasanya dalam sebuah lembaga pendidikan ada salah satu petugas yang tugas nya ialah menjadi penghubung atau juru bicara sekolah di masyarakat (Maulana, 2019). Petugas tersebut di sebut sebagai humas (Hasanah, 2022). Kemudian, dalam upaya penyelenggaraan hubungan masyarakat dan sekolah, ada beberapa prinsip yang mesti jadi perhatian bagi sekolah dan masyarakat itu sendiri (M, 2017), yakni :

1. Integrasi mengacu pada ikatan yang terjalin antara kepala sekolah atau madrasah, masyarakat, dan keluarga sebagai satu kesatuan yang kohesif.
2. Perkembangan yang berkelanjutan, atau proses yang berkesinambungan (berkelanjutan).
3. Komprehensif (cakupan) adalah penerimaan masyarakat terhadap informasi yang lengkap dalam segala hal.
4. Sederhana (simplicity), artinya data disajikan secara tidak rumit
5. Konstruktif: materi berpotensi meningkatkan persepsi masyarakat terhadap madrasah atau sekolah.
6. Adaptabilitas, atau kemampuan program sekolah atau madrasah dalam memperhitungkan dan memodifikasi lingkungannya.
7. Fleksibilitas merupakan kemampuan suatu program untuk beradaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pendidikan seseorang didukung oleh lingkungan atau masyarakatnya. Sosialisasi dan perolehan keterampilan terjadi di lingkungan komunitas tempat anak-anak tumbuh. Karena masyarakat memiliki kekayaan sumber belajar yang terstruktur dan tidak terstruktur, maka pengetahuan dan kemampuan dapat diperoleh secara bersamaan dalam lingkungan komunal. Ada tiga perspektif yang dapat digunakan untuk mengkaji hubungan antara masyarakat dan pendidikan 1) Pendidikan yang dilembagakan dan tidak dilembagakan disediakan oleh masyarakat, 2) Kelompok sosial atau lembaga masyarakat memberikan tujuan pengajaran, baik langsung maupun tidak langsung.. 3) Banyak sumber belajar yang dikembangkan dan tidak dirancang dapat diakses di masyarakat dan digunakan.

Derajat perkembangan suatu masyarakat dan sumber daya pendidikannya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan masyarakat tersebut dalam upaya pengalih fungsinya menjadi central dalam dalam proses akademik. Kelompok sebaya, organisasi pemuda, agama, hubungan sosial, politik, dan ekonomi termasuk di antara banyak lembaga masyarakat yang memainkan peran pendidikan yang signifikan. Seperti halnya media massa. Mari terus lebih terlibat dalam masyarakat dan menunjukkan kepedulian kita terhadap pendidikan di komunitas lokal kita. sehingga pendidikan dapat berlangsung se efektif mungkin.

Manajemen hubungan masyarakat dan sekolah/madrasah melibatkan interaksi yang saling menguntungkan antara lembaga (sekolah/madrasah) dengan masyarakat sekitar. Masyarakat dan sekolah/madrasah mempunyai hubungan yang ditandai dengan komunikasi antara kedua kelompok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan dan upaya pendidikan sekaligus menumbuhkan keterlibatan dan akuntabilitas masyarakat dalam kemajuan sekolah/madrasah.

Di sisi lain, meskipun masyarakat dan lembaga pendidikan mempunyai konteks yang sangat berbeda, namun keduanya saling terkait erat dan saling membutuhkan satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Keterlibatan masyarakat dengan sekolah dan madrasah diharapkan dapat merangsang inovasi dan kerja sama tim untuk menerapkan modifikasi kreatif yang akan meningkatkan standar pendirian secara keseluruhan.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Adib, Fauzan, & Santoso, Budi. (2016). Upaya peningkatan prestasi belajar siswa dengan disiplin kerja guru. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 1(1), 198. <https://doi.org/10.17509/jpm.v1i1.3388>
- AL-FARUQY, JAUHAR FAHMI. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Madrasah di MA Muhammadiyah 4 Beton Ponorogo. *Electronic Theses*. Retrieved from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/17288>
- Arifin, Muhamad Zainal, Djatmiko, Miko, & Fuady, Muhamad Jauharul. (2019). Penerapan gamification pada matakuliah Matematika Diskrit. *Tekno*, 27(1), 71. <https://doi.org/10.17977/um034v27i1p71-78>
- Cahyaningrum, Dayati Erni, & Diana, Diana. (2023). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka di Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 2895–2906. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4453>
- Dirjen Dikti Kemendikbud. (2020). Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 1–33. Retrieved from <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Dudung, Agus. (2018). Kompetensi Profesional Guru (Suatu Studi Meta-Analysis Desertasi Pascasarjana UNJ). *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9–19.
- Fatmawati, Rini. (2017). *Penulisan Kegiatan Pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Bahasa Inggris SMP*. 217–222. Retrieved from [file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/1339-Article Text-3539-1-10-20171107.pdf](file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/1339-Article%20Text-3539-1-10-20171107.pdf)
- Hardiyati, Mikyal, & Baroroh, Umi. (2019). Tujuan dan Materi Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Penelitian*, 13(1), 97. <https://doi.org/10.21043/jp.v13i1.4921>
- Hasanah, Aliyah Uhwatun. (2022). MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI MTs AL-AMIRIYYAH BLOKAGUNG BANYUWANGI. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*, 3(2), 193–207. <https://doi.org/10.30739/jmpid.v3i2.1316>

Maelani, Suklani

- Islamia, Farahdina. (2020). MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH PARTISIPASI MASYARAKAT DI SEKOLAH SMP TAZKIA IIBS MALANG (Vol. 10).
- Khaliq, Abdul. (2017). Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada Mts Muhammadiyah 3 Al-Furqon Banjarmasin. *Transformatif*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.23971/tf.v1i1.666>
- Lely, Asna. (2017). Manajemen Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Ar-Rahmah Curup Tengah Kabupateng Rejang Lebong (Ditinjau dari Analisis POAC). *STAIN Cu*.
- M, Suardi. (2017). Analisis Manajemen Humas dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 117–126. <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.434>
- Magareta, Arde. (2021). *Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Berbatuan Gamifikasi terhadap Keterampilan berfikir tingkat tinggi (HOTS) Kelas X pembelajaran biologi di SMA*.
- Maulana, Moh Hasan Afini. (2019). Manajemen Humas Pada Lembaga Pendidikan Pesantren. In *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* (Vol. 10). <https://doi.org/10.47766/itqan.v10i1.282>
- Munandar, Aris. (2020). Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 73–97. <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i2.132>
- Nasution, Inom, Shori, Hulga Ryan, Sinaga, Ahmad Hanafi, Mtd, Nadya Putri, Hartina, Dwi, Hrp, Rosa Marshanda, Sianipar, Desma Ramadhani, & Sitepu, Indriyani Boru. (2022). Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 1349–1358.
- Pepres. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 tahun 2021. In *BPKP* (Vol. 3).
- Priyatna, Muhammad. (2021). Manajemen Pengembangan Sdm Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(09), 21. <https://doi.org/10.30868/ei.v5i09.87>
- Rahayu, H. (2021). Manajemen Partisipasi Masyarakat Di Smp Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep. *Universitas Negeri Makassar*.
- Rifai, Muhammad. (2023). Peran Manajemen Partisipasi masyarakat dalam Meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten Boalemo pada sektor promosi potensi pariwisata. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 130–140.
- Rusmawati, Tutik. (2020). Partisipasi masyarakat, komite, Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Cendekia Sambas*, 1, 15–20.
- Shaliha, Maitsa Amila, & Fakhzikril, Moch Raka. (2022). Pengembangan Konsep Belajar dengan Gamifikasi. *Inovasi Kurikulum*, 19(1), 79–86. <https://doi.org/10.17509/jik.v19i1.43608>
- Tracy, Sarah j. (2022). *Qualitative research Method: Collecting evidence, Crafting Analysis, communicating impact*.
- Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003. (2021). *Demographic Research*, 49(0), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- UUD, 1945. (2021). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara*, 1–166.

- Winarsih, Bapri. (2022). Analisis penerapan pendidikan karakter siswa kelas III melalui program penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 2388–2392.
- Yin, Robert K. (2016). *Qualitative research from start to finish*.
- Yuniarti, Vitri. (2022). *Aplikasi Manajemen Humas dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MAN Malang 1 Vitri Yuniarti*. 14.
- Zenny Oktamia Rachman, Sonny Subroto Maheri, & Beny Mahyudi Saputra. (2022). Strategi Promosi Pemasaran Di Kind English Course Kampung Inggris Pare Kediri. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 1(3), 18–33.  
<https://doi.org/10.55606/jupiman.v1i3.427>